

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Otorisasi Jasa Keuangan Indonesia (OJK). Laporan keuangan harus merepresentasikan keadaan sebenarnya perusahaan sehingga akuntansi berbasis akrual dipilih oleh manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan karena dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil (FASB,1978). Dalam hal ini, manajemen biasa memilih metode manajemen laba dalam menyusun laporan keuangan sebagai tindakan untuk meningkatkan atau menurunkan laba sesuai kebutuhan perusahaan, tetapi dalam jangka panjang hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Dalam prakteknya, perusahaan menginginkan laba yang besar sehingga para investor akan tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Tetapi tidak semua perusahaan melaporkan tingkat laba sebenarnya sehingga para investor dan pemegang saham tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam memanipulasi laba perusahaan ini dikenal dengan istilah manajemen laba. Manajemen laba merupakan pilihan yang dapat dilakukan manajer dengan memanfaatkan kebijakan akuntansi untuk mencapai pelaporan laba tertentu (Scott, 2015)².

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia akibat manajemen laba adalah PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) merevisi laporan keuangan tiga tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Langkah yang dilakukan bank berkode BBKP itu menyita

perhatian otoritas terkait, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, Juru Bicara OJK Sekar Putih mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi mengenai manipulasi kartu kredit di Bukopin. Pihaknya juga masih dalam tahap klarifikasi mengenai revisi laporan keuangan yang terjadi di Bukopin. Otoritas bursa bahkan menyatakan akan memberi sanksi apabila ada perbedaan signifikan antara laporan keuangan lama dengan versi revisi yang dilakukan Bukopin.

Menurut informasi yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari para pihak yang mengetahui masalah ini, modifikasi data kartu kredit di Bukopin telah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya.

Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar.

Sebelum Otoritas melakukan klarifikasi, sebenarnya Bukopin telah 'dihukum' atas insiden ini. Bukopin telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 2,62 triliun pada akhir 2016, dari Rp 9,53 triliun menjadi Rp 6,91 triliun. Penurunan itu karena revisi turun saldo laba Rp 2,62 triliun menjadi Rp 5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar (Detik Finance, 2018)

Menurut teori agensi untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Muh. Arief Effendi, 2016). Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan maupun oleh pemilik perusahaan. sehingga diharapkan terdapat tata kelola perusahaan yang baik, yang dapat menimbulkan dan membangkitkan kepercayaan (*trust*) dari berbagai pihak terhadap kinerja perusahaan yang diwakili dari Laporan Keuangan Perusahaan (Dini Onasis, 2017). Dengan adanya praktek *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan akan membatasi manajemen laba karena adanya mekanisme pengendalian dalam perusahaan tersebut. *Good Corporate Governance* (GCG) diproksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit .

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang hanya menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengurangi kecurangan , Penelitian ini memperlakukan *free cash flow* sebagai variable tambahan karena faktor lain yang mendorong praktik manajemen laba adalah arus kas bebas (*free cash flow*). Manajer cenderung melakukan praktik manajemen laba pada perusahaan yang memiliki arus

kas bebas yang tinggi. *Free cash flow* adalah arus kas yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh investor (pemegang saham dan pemilik utang) setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk-produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan (Brigham & Houston, 2001). *Free cash flow* yang tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan untuk investasi secara maksimal atau sebanding dengan penghasilan pemilik perusahaan dapat menyebabkan masalah keagenan. Masalah keagenan terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen pada saat penggunaan *free cash flow*. *Free cash flow* cenderung digunakan sebagai investasi oleh pihak manajemen daripada dibagikan kepada pemegang saham untuk kesejahteraan pemegang saham (Bukit dan Nasution, 2015).

Penelitian Hafizh Rahdal (2017) menunjukkan hasil bahwa *free cash flow* yang tinggi dapat mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Namun, penelitian Yogi dan Damayanthi (2016) yang menunjukkan bahwa *free cash flow* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dimana *free cash flow* tidak mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba.

Adapun tujuan penelitian ini untuk meneliti kembali hubungan good corporate governance dan *free cash flow* terhadap manajemen laba karenanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan fenomena serta teori yang didapatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ditunjukkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba?
3. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba?
4. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap manajemen laba?
5. Apakah terdapat pengaruh *free cash flow* terhadap manajemen laba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
3. Pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba.
4. Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba.
5. Pengaruh *free cash flow* terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan mengenai keefektifan dalam menilai manajemen laba beserta faktor penyebab terjadinya manajemen laba dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumber referensi bagi investor dalam memilih perusahaan yang telah menerapkan

good corporate governance dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan untuk perusahaan yang terkait.

